

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burhan Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif* (Edisi Pert). Jakarta: Prenada Media Group.
- Fuad, A. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke). Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Narwoko dan Suyanto. (2006). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana, Jakarta
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2012. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Saifuddin Azwar. (2014). *Metode Penelitian* (Cetakan XV). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sugiyono, P. D. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. (Erang Risanto, Ed.). Yogyakarta: CV Andi Offset.

Jurnal

- Bintari, A. (2016). Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Di Provinsi DKI Jakarta, 2(2), 220–238.
- Fadhlullah, N. (2017). Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh : Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina Nyak Fadhlullah Sejak Aceh mulai memberlakukan Qanun Nomor 6 masyarakat , bukan hanya di Aceh tetapi juga di tingkat

- nasional syariat Islam), Pemerintah Provinsi Aceh kemudian me, 7(1), 16–40.
- Faurisman. (2016). Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Aceh Dalam Harmonisasi Perancang Qanun Di Aceh. Banda Aceh. Retrieved from <http://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=22038&page=1>
- Febrian Lutfi. (2015). Formulasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2010-2014 (Studi Kasus di Desa Tridadi dan Desa Sumberarum Kabupaten Sleman (Cover).pdf.
- Isa, M. (2018). Pelibatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Aceh Dalam Pembentukan Qanun Di Kabupaten Aceh Besar.. Banda Aceh. Retrieved from http://etd.unsyiah.ac.id/baca/notfound.php?biblio_id=47793
- Kamarusdiana. (2016). Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. *Ahkam*, XVI, 151–162.
- Rahman, A. septia. (2017). Peranan Wanita Karier Dalam Keluarga , Pola Asuh Dan Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Wanita Karier Pada Jl. Anggrek RT 002/018 Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan). *Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1.
- Rizqi, M. D. (2018). Formulasi Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015.
- Wijayanti, Shinta. (2017). Optimalisasi Keterlibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
- Sosiawati, Arini (2017). Peran Dinas Sosial Povinsi DIY Dalam Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Tahun 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan dan Pembinaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.